

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN DESA

**Praptiningsih\*, Fitri Yetty**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

---

### Article Information

### ABSTRACT

**Category:** Business and Management Research Paper

**Corresponding author:**  
praptiningsih@upnvj.ac.id  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, 12450

**Reviewing editor:**  
Rachma Zannati, STEI  
Indonesia, Jakarta, Indonesia

Received 27 Sep 2019  
Accepted 25 Feb 2020  
Accepted author version  
posted online 29 Feb 2020



Published by Economics  
Faculty of Attahiriyah  
Islamic University

**Purpose-** This study aims to determine the effect of the Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, the influence of Financial Supervision, Competence of Human Resources, Regional Financial Accounting Systems to the Quality of Financial Statement Management and Administration.

**Design/methodology/approach-** The sample in this study were employees of the Regional Government Work Unit (SKPD) of Pandeglang Regency with 50 respondents from 18 Regional Apparatus Organizations (OPD) of Pandeglang Regency. The data analysis technique used in this study is the multiple linear regression.

**Findings-** The results of this study indicate that the Use of Information Technology and human resource competencies have a significant effect on the Quality of Management and Administration of Financial Statements

**Implications-** For SKPD Pandeglang regency it is recommended to improve financial supervision and internal control systems in presenting the quality of financial statement information on the management and administration of financial statements.

**Keywords:** Quality, Management, Administration, Reports, and Finance



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 license

To link this article  
<http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/376>

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN DESA

Praptiningsih\*, Fitri Yetty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: praptiningsih@upnvj.ac.id, fitriyetty\_61@yahoo.com

## Abstrak

**Tujuan-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pengaruh Pengawasan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

**Desain / metodologi / pendekatan-** Sampel penelitian adalah pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebanyak 50 responden dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten pandeglang. Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

**Temuan-** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

**Implikasi-** SKPD kabupaten Pandeglang disarankan untuk meningkatkan pengawasan keuangan dan sistem pengendalian internal dalam upaya meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.

**Kata kunci:** Kualitas, Pengelolaan , Administrasi ,Laporan dan Keuangan

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan perundang-undangan No/1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa batas waktu penyerahan LKPD yang disampaikan gubernur/ bupati/ walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah setahun anggaran berakhir. Begitupun dengan penyampaian laporan keuangan pada pasal 20 Undang-Undang No/15Tahun 2014 tentang tanggung jawab, pemeriksaan, dan pengelolaan keuangan negara, Pertanggung jawaban pengelolaan APBD Daerah dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD, kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Pemerintah selambat-lambatnya (60-hari) setelah laporan hasil pemeriksaan LKPD diterima. Namun fakta dilapangan masih memperlihatkan ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang berisi tentang karakteristik laporan keuangan andal dan relevan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan semester I tahun 2016 ditemukan bahwa ada 533 laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 dengan hasil temuan 6.150 kelemahan SPI dan 6.016 ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Sedangkan hasil evaluasi BPK atas 135 temuan di IHPS II pada LKPD 2015 terdapat keterlambatan pelaporan 9 LKPD tahun 2015 kepada BPK. Ketidakpatuhan atas 9 LKPD tahun 2015 dalam penyampaian laporan keuangan pendapatan daerah atau LKPD terhadap undang-undang memiliki opini audit yang baik, diantaranya terdapat opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas 1 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 7 LKPD, dan opini Tidak memberikan Pendapat (TMP) atas 1 LKPD.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani, (2015) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Syarifudin, (2014) yang membuktikan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi laporan keuangan. Sistem pengendalian internal mampu berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun, (2015) yang membuktikan bahwa pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Yendrawati, (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi laporan keuangan. Penelitian tentang pengawasan keuangan dilakukan oleh Septiadi, (2014) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian Magdalena, (2014) menyatakan pengawasan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk, (2014) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ihsanti, (2014) yang membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi laporan keuangan

## 2. Tinjauan Literatur

Sistem akuntansi pemerintah daerah atas kompleksitas serta volume transaksi yang besar memerlukan bantuan pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat perlu didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nadir dan Hasyim, (2017) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan dan administrasi Laporan Keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan baik dalam hal keakurasian maupun ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap unsur kualitas laporan keuangan yaitu ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

Sistem pengendalian internal didefinisikan oleh *Committe of Sponsoring Organization of the Treadaway Commission (COSO)* sebagai suatu proses yang ditetapkan oleh dewan direksi, manajemen, dan aparat lainnya. Sistem pengendalian internal dirancang untuk menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan perusahaan dengan katagori sebagai berikut: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan keuangan, (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Ardana & Lukman (2015, hlm. 75). Hasil Penelitian yang dilakukan Adewale (2014), Bangun (2015), Aramide dan Bashir (2015), dan Surastiani (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan,

sebaliknya semakin buruknya sistem pengendalian internal pemerintah maka kualitas informasi yang dihasilkan akan semakin buruk. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

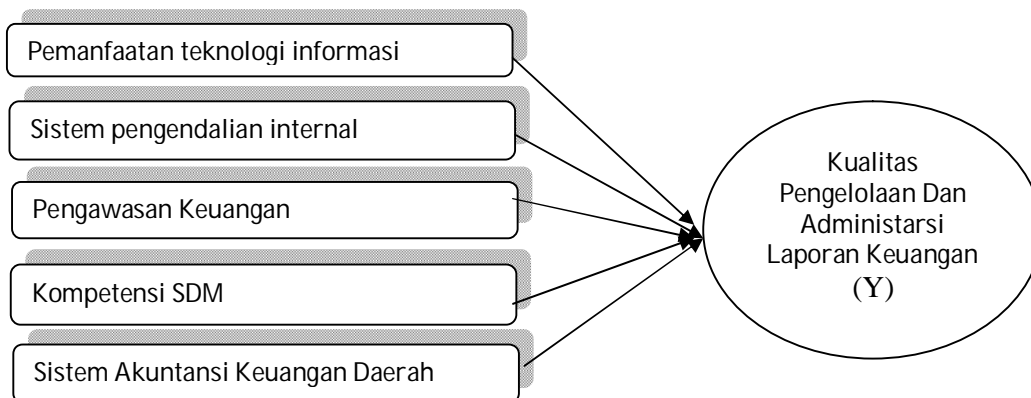
H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

Pengawasan merupakan proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Magdalena, (2014) yang membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengawasan Keuangan Memiliki Pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

Kompetensi merupakan karakteristik perilaku individu yang berhubungan dengan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Seseorang atau individu yang memiliki kompetensi, maka akan berkerja dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*ability*) sehingga meminimalisakan kesalahan yang terjadi, (Spencer dalam Sudarmanto, 2015). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Bangun, (2015) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan. Sumber daya manusia yang mengerti dengan akuntansi pemerintah serta memiliki pengalaman pada pengelolaan keuangan daerah mampu menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan..



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sistem akuntansi keuangan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Proses sistem akuntansi keuangan menghasilkan informasi laporan keuangan

yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah. Halim dan Kusufi (2014). Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian Hanifa, (2016) yang membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang baik maka harus didukung oleh kompetensi pengelola keuangan yang memadai. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

### **3. Metode**

#### **Desain Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada satuan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Pemerintahan Pandeglang. Sampel ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data penelitian menggunakan data primer dengan cara menyebarkan Kuesioner kepada reponden yang sudah ditentukan. Sebanyak 50 kuesioner disebar ke 10 SKPD pemerintah daerah (pemda) di Kabupaten Pandeglang, dengan tingkat pengembalian sebanyak 100%. Dengan Demikian, data yang digunnakan dalam penelitian ini berjumlah, 50 reponden yang selanjutnya akan diolah menggunakan teknik statistik untuk menjawab hipotesis.

#### **Pengukuran**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengelolaan & administrasi keuangan. Yang diukur menggunakan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dengan menggunakan 16 pertanyaan. Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur menggunakan indikator jaringan internet, jaringan internet dimanfaatkan dengan baik, laporan keuangan terkomputerisasi, dan komputer tersedia dengan 7 pertanyaan.

Sistem pengendalian internal mencakup indikator adanya kode etik tertulis, pimpinan memberikan contoh perilaku secara etis, kompetensi pimpinan, pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik, metode pengukuran resiko, batas toleransi resiko, pengendalian atas resiko, penetapan kebijakan, otorisasi sesuai aktifitas, pemeriksaan independen, pengkomunikasian informasi atas tanggung jawab, sistem informasi yang baik dan informasi laporan keuangan, pengawasan secara periodik dan pengawasan pengendalian internal dengan 15 pertanyaan.

Pengawasan menggunakan indikator evaluasi kegiatan, pencatatan bukti, pencatatan transaksi tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, Sistem pelaksanaan dan laporan SKPD sesuai SAP dengan 6 pertanyaan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup indikator Pengetahuan (*Knowledge*), Keahlian (*Skill*) dan Perilaku (*Attitude*) dengan jumlah 18 pertanyaan. Sistem akuntansi keuangan daerah mencakup indikator sistem akuntansi yang digunakan pada dinas ini sesuai dengan SAP, Telah dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan laporan keuangan, setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi, semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis, melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi, pengklasifikasian transaksi sesuai denga pos yang semestishnya, melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan, membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi, dan pelaporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik dengan jumlah 9 pertanyaan.

## Teknik Analisis

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Generalisasi uji asumsi klasik dengan analisis dan uji hipotesis, prosedur yang dilakukan dibantu dengan menggunakan program komputer yaitu program SPSS, mencakup pengujian uji validitas, reliabilitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima Ghozali, (2018). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, (2018). Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen Ghozali, (2018). Model regresi dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Kualitas Pengelolaan & administrasi laporan keuangan
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
$X_1$	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
$X_2$	= Sistem Pengendalian Internal
$X_3$	= Pengawasan Keuangan
$X_4$	= Kompetensi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
$X_5$	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
$\varepsilon$	= Error

## 4. Hasil dan Pembahasan

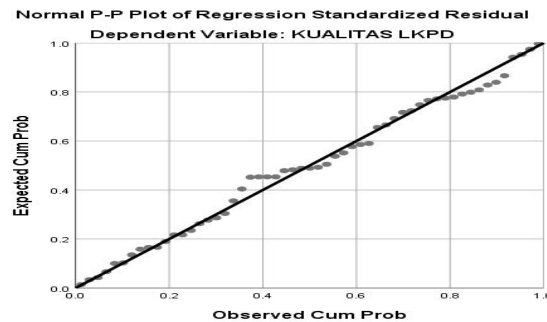
Data dikumpulkan dari 50 kuesioner kepada 10 SKPD pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang. Kuesioner yang diisi oleh para pegawai keuangan yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah sejumlah 50 kuesioner dengan tingkat respon berjumlah 100%. Hasil Uji validitas diperoleh semua variabel valid. Setelah hasil kuisisioner dikatakan *valid*, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai *cronbach alpha* melebihi 0,70 maka pernyataan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya.

Tabel 1. Statistik dan Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
PTI	50	22	35	29,27	2,779
SPI	50	45	75	61,16	8,047
PK	50	28	30	29,00	2,679
KSDM	50	68	90	79,08	5,566
SAKD	50	31	45	39,94	3,248
KILK	50	60	80	73,38	4,789
<i>Valid N (listwise)</i>	50				

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas , total nilai rata-rata untuk pernyataan terkait variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah setiap pegawai bagian keuangan dan akuntansi yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah (pemda) di wilayah kabupaten Pandeglang setiap pegawai bagian keuangan dan akuntansi yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah di wilayah kabupaten Pandeglang berkualitas dalam menyajikan laporan keuangan dimana laporan keuangan. Uji normalitas dengan menggunakan analisis P-Plot *Regression Standardized Residual* dan *Kolmogorov Smirnov (K-S)*. Hasil normalitas dengan menggunakan analisis P-Plot *Regression Standardized Residual* berdasarkan hasil pengolahan data ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:



**Gambar 1. Distribusi Data Berdasarkan PP Plot Regression Standardized Residual**

Berdasarkan gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal atau grafik P-Plot menunjukkan pola berdistribusi normal, jadi data pada variabel kualitas Administrasi dan pengelolaan keuangan dapat dikatakan normal/memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan pula dengan pengujian melalui uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan menggunakan uji statistik nonparametik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		50
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	3,59569716
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,116
	<i>Positive</i>	0,076
	<i>Negative</i>	-0,116
Kolmogorov-Smirnov Z		0,823
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		<i>0,508</i>

Sumber : Data primer yang diolah

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independensi). Uji multikolonieritas dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dari setiap variabel. Multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $\geq 10$ . Hasil pengujian multikolonieritas sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
PTI	0,568	1,759
SPI	0,646	1,548
PK	0,646	1,548
KSDM	0,473	2,115
SAKD	0,673	1,486

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 data menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas di dalam model regresi dan tidak ada korelasi antar variabel independen untuk keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Hasil pengujian heteroskedastisitas sebagai berikut model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan grafik *Scatterplot* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk menyajikan kualitas Pengelolaan dan Administrasi laporan keuangan.



**Tabel 4. Hasil Uji Glejser**

Model		Sig.
1	(Constant)	1,000
	PTI	1,000
	SPI	1,000
	PK	1,000
	KSDM	1,000
	SAKD	1,000

Hasil uji glejser dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikansi dari variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah  $> 0,05$ . Sehingga hasil uji glejser telah sesuai dengan grafik *scatterplot* yang menunjukkan seluruh variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi dependen dengan nilai Absolut (AbsUt). Jadi dapat disimpulkan model regresi ini mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data untuk uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji  $R^2$**

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>			
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	,661 <sup>a</sup>	0,436	0,4

a. *Predictors:* (Constant), KSDM, SPI, SAKD

b. *Dependent Variable:* KILK

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,400 dengan persentase sebesar 40 %. Hal ini mengartikan bahwa variabel Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 40 % sedangkan sisanya sebesar 60 % dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

**Tabel 6. Hasil Regresi**

Model				t	Sig.
1	(Constant)	25,434	8,805	3,146	0,003
	PTI	0,518	0,155	3,344	0,002
	PK	0,023	0,082	0,320	0,519
	SPI	0,345	0,125	0,278	0,782
	KSDM	0,375	0,139	2,710	0,018
	SAKD	0,416	0,199	2,092	0,042

Sumber: Data primer yang diolah

Untuk mencari  $t_{tabel}$  digunakan  $df=n-k-1$ , dimana  $n$  = jumlah sampel dan  $k$  = jumlah variabel independen, sehingga didapat  $df = 50-3-1 = 46$ . Berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,0129 . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat diketahui bahwa variabel Pemanfaatan teknologi informasi memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3.344 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2.007 sehingga dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.344 > 2.0129$ ).

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ) sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,710 < 2,0129$ ) dengan signifikansi sebesar  $0,09 > 0,05$  hal ini berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Internal memiliki bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,278 < 2,0129$ ) dengan signifikansi sebesar  $0,782 > 0,05$  Maka disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.

Pengawasan keuangan memiliki bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,320 < 2,0129$ ) dengan signifikansi sebesar  $0,519 > 0,05$  Maka disimpulkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,092 > 2,0129$ ) dengan signifikansi sebesar  $0,42 > 0,05$  hal ini berarti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan .

Persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KILK} = 25.434 + 0,518 \text{ PTI} + 0,023 \text{ SPI} + 0,345 \text{ PK} + 0,375 \text{ KSDM} + 0,416 \text{ SAKD}$$

Hasil dari persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah untuk variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan,  $\alpha$  yang dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 25.434 yang artinya jika tidak ada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi KeuanganaDaerah atau bernilai konstan, maka kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan oleh pemerintah kota Pandeglang dilakukan secara tidak Berkualitas.

Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,023. Dari persamaan tersebut dapat diartikan jika variabel independen lain nilainya konstan dan kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,023.

Pengawasan keuangan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,345. Dari persamaan tersebut dapat diartikan jika variabel independen lain nilainya konstan dan kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,345.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,375 yang berarti apabila setiap terjadi penambahan kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan, maka kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan di pemerintahan Kota Pandeglang akan bertambah sebesar 0,375 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,416 yang berarti apabila terjadi penambahan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar satu satuan, maka kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan di pemerintahan Kota Pandeglang akan bertambah sebesar 0,416 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hasil yang diperoleh akan diuraikan dibawah ini.

#### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.**

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki tingkat signifikan 0.003 yang kurang dari 0.05 artinya Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan. Hal ini disebabkan dari hasil rata-rata pernyataan responden sebesar 29,27 dengan jumlah 7 pertanyaan diperoleh rata2 jawaban reponden sebesar 4.18 artinya jawaban responden yang dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam kategori baik atau memiliki makna pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang telah ditetapkan dalam UU.

Penggunaan *software* sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/Tahun 2014 yaitu Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56/Tahun 2005, dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 6 Tahun 2016. Sesuai dari data kuesioner yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam setiap SKPD sudah terpasang jaringan internet, dan dimanfaatkan dengan baik. Dan utamanya, dalam proses pembuatan pelaporan tersebut sejak awal transaksi hingga pembuatan pelaporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang berjalan disetiap SKPD maka kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Hasil penelitian sejalan dengan Nadir & Hasyim (2017) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.**

Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan dengan tingkat signifikan 0.519 diatas 0.05. Hal ini disebabkan dari hasil rata-rata pernyataan responden sebesar 61,16 dengan jumlah 15 pertanyaan diperoleh rata2 jawaban reponden bernilai 4.077 artinya jawaban responden yang merespon baik. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten pandeglang Hal ini disebabkan masih ada beberapa SKPD di Kota Pandeglang terdapat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 46 K/L, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera didalam Ikhtisar

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPK. Dan berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan, masih ada beberapa SKPD yang penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran belum dibuatkan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan tidak adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu

kegiatan atau transaksi. Dalam menjalankan sistem pengendalian internal belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh staff dari beberapa SKPD. Tetapi dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten Pandeglang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, Walaupun sistem pengendalian internal telah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum diterapkan secara efektif menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelon (2015), dan Maysaroh (2018), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan, dikarenakan penerapan sistem pengendalian internal belum secara maksimal dan menyebabkan hasil pelaporan keuangan kurang baik.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.**

Pengawasan Keuangan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan dengan tingkat signifikan 0.782 diatas 0.05. Hal ini disebabkan dari hasil rata-rata pernyataan responden sebesar 29 dengan jumlah 6 pertanyaan diperoleh rata2 jawaban reponden nernilai 4.833 artinya jawabanresponden yang merespon baik. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten pandeglang Dalam menjalankan Pengawasan keuangan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh staff dari beberapa SKPD. Tetapi dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah kabupaten Pandeglang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah . Hal ini sejalan dengan Magdalena (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.**

Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan dengan tingkat signifikan 0,018 di bawah 0.05. Hal ini disebabkan dari hasil rata-rata pernyataan responden sebesar 79,08 dengan jumlah 18 pertanyaan diperoleh rata2 jawaban reponden nernilai 4.39 artinya jawaban responden yang merespon baik. Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Kompetensi yang dimiliki pegawai SKPD pemerintah daerah Tangerang Selatan harus meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan Perilaku (*attitude*). Berdasarkan data yang diperoleh sumber daya manusia pada pemerintah daerah Tangerang Selatan sudah optimal, dikarenakan pegawai memiliki pemahaman tentang laporan keuangan. Selain itu, sebagian besar pegawai sub bagian keuangan memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun, diketahui juga sebagian besar data responden memiliki latar belakang pendidikan S1 dengan jurusan akuntansi, hal ini menjadi nilai tambah dalam menyajikan laporan keuangan. Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Da kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan daerah.

## **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan.**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan tingkat signifikan 0,042 di bawah 0.05. Hal ini disebabkan dari hasil rata-rata pernyataan responden sebesar 39,94 dengan jumlah 9 pertanyaan diperoleh rata-rata jawaban responden bernilai 4.43 artinya jawaban responden yang merespon baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang sebagai pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, setiap transaksi keuangan yang dilakukan pencatatan dilakukan secara kronologis dan didukung oleh bukti yang sah. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakannya maka semakin baik dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana jenjang pendidikan jurusan dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan ketika pemerintah telah membuat sistem akuntansi keuangan daerah maka tujuannya untuk meningkatkan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menjalankan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini juga sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71/Tahun 2010 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah sebagai berikut Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanifa (2016).

## **5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang**

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan penggunaan variabel maka penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan beberapa variabel maupun indikator yang lain, seperti kompetensi pengelola keuangan, peran audit intern, pemanfaatan teknologi informasi, good governance. Waktu penyebaran kuesioner yang terbatas sehingga hanya dapat menyebarkan kuesioner di SKPD yang berada di lingkungan kabupaten Pandeglang dan hasil yang didapat menjadi kurang maksimal.

## **6. Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan Keuangan desa di kabupaten Pandeglang. Hasil analisis menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas Pengelolaan dan administrasi laporan keuangan desa. Sedangkan pengawasan keuangan dan sistem pengendalian internal secara statistik tidak signifikan.

## **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka SKPD kabupaten Pandeglang perlu memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, system akuntansi keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan skill pegawai pengelola keuangan desa secara teratur dan didasarkan pada kebutuhan di lapangan. Sedangkan Pengawasan keuangan dan sistem pengendalian internal perlu dievaluasi ulang karena tidak terbukti memiliki efek terhadap kualitas laporan keuangan.

## Aknowledgement

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penelitian ini berhasil diselesaikan. Doa terbaik terutama dari suami dan anak-anak keluarga kami. Tak luput terimakasih atas bantuan dari UPN Veteran Jakarta yang telah mendukung penuh program penelitian mulai dari pendampingan melalui klinik penelitian, workshop, monitoring melalui reviewer dan pendanaan sehingga dapat dilaksanakan penelitian.

## Funding

The author receive no direct funding for this research

## Daftar Pustaka

- Aliman, N. K., Hashim, S. M., Wahid, S. D. M., & Harudin, S. (2014). The effects of destination image on trip behavior: Evidences from Langkawi Island, Malaysia. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3(3), 279-291.
- Adewale, H.O. (2014). 'Internal control system: a managerial tool for proper accountability a case study of Nigeria customs service'. *European Scientific Journal*, Editional vol.10 No.13, ISSN:1857-7881 e-ISSN;1857-7431.
- Amirade & Bashir. (2015). 'The effective of internal control system and financial accountability at local government level in Negeria'. *Internasional Journal of Research in Business Mangement*. ISSN (E): 3221-886X; ISSN (P): 2347-4572. vol.3, Issue 8, Aug 2015, page. 1-6.
- Ardana, I.C & Lukman, H (2016). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andini Dewi dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I* Vol. 24 No.1
- Bangun, M. (2015). 'Pengaruh good goveranance, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuaangan: studi empiris pada skpd kota dumai'. *Jom Fekon*. vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. Diakses12Februari2019,dari [https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2018/I/ihps\\_i\\_2018\\_1538459607.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2018/I/ihps_i_2018_1538459607.pdf)
- Desmiyawati. (2014). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan pelaporan keuangan: studi empiris pada SKPD Pemda Riau'. *Jurnal Akuntansi*. vo.2, no.2, April 2014. Pages: 163-178. ISSN: 2337-4314.
- Dewi,dkk (2014). 'Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemda Bali
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Undip
- Halim, A & Kusufi, M. (2013). *Akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifa, L. (2016). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal progres ekonomi pembangunan*. vol. 1, no.2, 2016. E-ISSN: 2502-5171.
- IAI (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ihsanti, E. (2014). 'Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laaporan keuangan daerah: studi empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota'. *Jurnal akuntansi*. vol.2, No. 2, 2014.
- Kemenkeu, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- Kemenkeu, 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Magdalena, Tiur. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*.
- Maysaroh, K.W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Michelon, G. (2015). *Board Monitoring and Internal Control System Disclosure in Different Regulatory Environments*, Emerald Insight. ISSN: 0967-5426.
- Muryani, Devi Esti (2016) Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan daerah (Studi kasus pada kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*;
- Nadir, R., dan Hasyim. (2017). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru)*, *Akuntabel* (Vol. 14, No. 1). ISSN: 0216-7743
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah*. 2013. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*. 2007. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. 2008. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat*. (2014). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. (2005). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. (2000). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar akuntansi Pemerintahan*. (2005). Jakarta.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (teori, dimensi pengukuran, dan implementasi dalam organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2016). *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno (2012) Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Syarifudin, A. (2014). 'Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah: studi empiris pada Pemkab Kebumen'. *Jurnal fokus bisnis*, vol. 14, No.2, Desember 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara* (2004) Jakarta
- Yendrawati, R. (2013). 'Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating'. *Jurnal akuntansi dan auditing indonesia*. vol.7, No.2, 2013.
- Yurawati, Nina. C. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)*, *Jurnal Ekonomi KIAT* (Vol. 26 No. 1)

This page intention to blank...